

Judul : Kebijakan Harus Dipikirkan Matang
Tanggal : Minggu, 16 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Kebijakan Harus Dipikirkan Matang

ANGGOTA Komisi VII DPR Sartono meminta Pemerintah memberikan kepastian terkait kebijakan ekspor batubara.

Menurutnya, Pemerintah dalam menyusun sebuah kebijakan tidak boleh grasa grusu, terkesan tidak matang dalam perencanaan dan perhitungan.

"Kebijakan larangan dibuka, ini seolah membingungkan. Harus ada kepastian, kepastian-nya jangan seminggu pasti, seminggu berikutnya tidak pasti. Ini perlu pemikiran dan perhitungan matang. Yang jelas, tidak harus merugikan pihak lainnya," tegasnya, Jumat (14/1).

Politisi Partai Demokrat ini melihat, yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri terlebih dahulu, untuk memenuhi kebutuhan PLN dalam rangka mencegah pemadaman (*black out*) kepada 10 juta pelanggan.

"Mengapa defisit pasokan ini bisa terjadi? Padahal, kita mempunyai batubara

melimpah, kok sampai terjadi kekurangan," tanyanya.

Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengatakan, sebelum membuat kebijakan strategis harusnya Pemerintah membuat kajian komprehensif agar keputusan itu dapat diterima dengan baik.

"Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus akurat, jangan sekadar gertak sambal. Baru sepuluh hari pelarangan ekspor batubara, kebijakan itu sudah dicabut kembali," katanya.

Menurutnya, kebijakan yang diambil harusnya berbasis data komprehensif baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penyediaan batubara.

Jangan sampai, ketika pengusaha teriak termasuk juga negara-negara importir batubara Indonesia, kita baru ter-gopoh-gopoh merespons dan mencabut pelarangan ekspor tersebut. ■ KPJ

"Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus akurat, jangan sekadar gertak sambal. Baru sepuluh hari pelarangan ekspor batubara, kebijakan itu sudah dicabut kembali."